

# JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

**The Journal of Accounting and Finance**

Volume 21 Nomor 1, Januari 2016

**SUSI SARUMPAET**

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Rasio Keuangan  
Dalam Laporan Tahunan di Indonesia

**AS SHAUMY GAHARA DAN DEWI SUKMASARI**

Pengaruh Self Assesment System dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak  
Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai  
(Studi Pada KPP Pratama di Kota Bandar Lampung)

**WIDYA RIZKI EKA PUTRI**

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Voluntary Disclosure Laporan Tahunan Pada  
Perusahaan Pertambangan Yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia

**ADHITYA AGRI PUTRA**

Pengaruh *Financial Leverage*, *Earning Per Share*, dan Pertumbuhan Laba  
Terhadap Return Awal dan Return 15 Hari Pasca IPO

**NIKEN KUSUMAWARDANI DAN FAJAR GUSTIAWATY DEWI**

Implementasi Standar Pelayanan Minimal Dalam Pengukuran Kinerja Sektor Publik  
(Studi Empiris Pada Sekolah Dasar Negeri/Madrasah Ibtidaiyah Negeri  
Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung)

**RINDU RIKA GAMAYUNI**

Dukungan Manajemen Sebagai Variabel Moderating Bagi  
Efektivitas Fungsi Audit Internal Pada Pemerintah Daerah

**FARICHAH**

Analisis Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap  
Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus pada Bursa Efek Indonesia)

**WAYAN KRISMA ANGGA PRATAMA DAN MEGA METALIA**

Frekuensi Perdagangan Saham Beraksi Pada  
Pengungkapan Informasi Akuntansi di Website

Diterbitkan oleh:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

<http://fe-akuntansi.unila.ac.id/download/jak>

Jurnal Ilmiah Berkala Empat Bulanan ISSN 1410 – 1831

# JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 21 Nomor 1, Januari 2016

**Penanggung Jawab:**

Farichah

**Ketua Penyunting:**

Lindrianasari

**Penyunting Pelaksana:**

Rindu Rika Gamayuni

**Penyunting Ahli/Mitra Bestari:**

Zaki Baridwan

*Universitas Gadjah Mada*

Indra Wijaya

*Universitas Gadjah Mada*

Mahatma Kufepaksi

*Universitas Lampung*

Susi Sarumpaet

*Universitas Lampung*

Ratna Septiyanti

*Universitas Lampung*

**Anggota Administrasi/Tata Usaha:**

Suleman

**Alamat Redaksi/Penerbit:**

Redaksi Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Universitas Lampung

Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng

Bandar Lampung 35145

Telp. (0721) 705903, Fax. (0721) 705903

[rindu.gamayuni@yahoo.com](mailto:rindu.gamayuni@yahoo.com) Frekuensi

terbit: enam bulanan

# JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 21 Nomor 1, Januari 2016

Daftar isi .....	i
<b>SUSI SARUMPAET</b> Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Rasio Keuangan Dalam Laporan Tahunan di Indonesia .....	1 - 15
<b>AS SHAUMY GAHARA DAN DEWI SUKMASARI</b> Pengaruh Self Assesment System dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama di Kota Bandar Lampung) .....	17-28
<b>WIDYA RIZKI EKA PUTRI</b> Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Voluntary Disclosure Laporan Tahunan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia .....	29-43
<b>ADHITYA AGRI PUTRA</b> Pengaruh <i>Financial Leverage</i> , <i>Earning Per Share</i> , dan Pertumbuhan Laba Terhadap Return Awal dan Return 15 Hari Pasca IPO .....	45-54
<b>NIKEN KUSUMAWARDANI DAN FAJAR GUSTIAWATY DEWI</b> Implementasi Standar Pelayanan Minimal Dalam Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Studi Empiris Pada Sekolah Dasar Negeri/Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung).....	55-62
<b>RINDU RIKA GAMAYUNI</b> Dukungan Manajemen Sebagai Variabel Moderating Bagi Efektivitas Fungsi Audit Internal Pada Pemerintah Daerah.....	63-75
<b>FARICHAH</b> Analisis Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus pada Bursa Efek Indonesia).....	77-85
<b>WAYAN KRISMA ANGGA PRATAMA DAN MEGA METALIA</b> Frekuensi Perdagangan Saham Beraksi Pada Pengungkapan Informasi Akuntansi di Website .....	87-104

# IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

(Studi Empiris Pada Sekolah Dasar Negeri/Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Tanjung Seneng  
Kota Bandar Lampung)

**Niken Kusumawardani**

Email: [nik3n.kusumawardani@yahoo.com](mailto:nik3n.kusumawardani@yahoo.com)

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

**Fajar Gustiawaty Dewi**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

## ABSTRAK

*This study aims to assess the implementation of minimum service standards in relation to the performance of the public sector. The study was conducted at the State Elementary School (SDN) and State Islamic Elementary School (MIN) District of Tanjung Seneng Bandar Lampung using descriptive statistical methods. The results showed eight indicators of minimum service standards have been implemented and well categorized.*

*Keywords: minimum service standard, performance public sector*

## A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan *good governance* di Indonesia, pemerintah diwajibkan untuk melaporkan setiap hasil program yang sudah dijalankan, sehingga masyarakat mampu memberikan penilaian terhadap program kerja yang sedang ataupun sudah dilaksanakan. Penilaian ini akan mengarah pada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik tidak hanya dilihat dari aspek finansial saja, namun lebih menekankan pada kepuasan pengguna terhadap pelayanan tertentu. Sektor pendidikan menjadi salah satu bidang konsentrasi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat, selain itu bidang pendidikan juga sudah menjadi bagian dari program kerja setiap pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM), seluruh pemerintahan daerah baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun standar pelayanan minimal untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. Hal ini diperkuat dengan Permendikbud No. 15 Tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi, harus pula diikuti dengan perubahan pada manajemen pemerintahan daerah. Orientasi pemerintah daerah saat ini hendaknya lebih kepada kepentingan eksternal dengan peningkatan pelayanan dan pendelegasian sebagian tugas pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat atau pun pasar. Hal ini berarti pemerintah akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat. Agar tidak terjadi kesalahan persepsi antara pemerintah daerah dan masyarakat maka perlu dibuat indikator dan target-target yang disusun dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar ini nantinya yang



akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak. Pemerintah menjadikan SPM sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan publik, sedangkan masyarakat menggunakannya sebagai pedoman untuk mengukur kinerja pemerintah daerah.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai pengukuran level aktivitas dan capaiannya melalui serangkaian indikator (Wang, 2000). Sedangkan menurut Vries (2001) pengukuran kinerja di sektor publik dapat didefinisikan sebagai “*a systematic attempt to learn how responsive a government’s services are to the needs of society*”. Pengukuran kinerja merupakan cara sektor publik menentukan apakah telah menyediakan produk yang berkualitas pada kos yang masuk akal.

Informasi kinerja yang seragam menyediakan standar bagi manajer publik untuk membandingkan kinerja antar waktu. Indikator kinerja merupakan bagian yang esensial dalam mengevaluasi kinerja dan auditing untuk meyakinkan efisiensi dan efektivitas suatu program.

Pengembangan sistem pengukuran kinerja didasarkan pada prinsip-prinsip berikut (Vries, 2001):

- Sistem pengukuran kinerja berorientasi pada hasil (*result-oriented*): secara prinsip fokus pada outcome dan output.
- Sistem pengukuran kinerja *selective*: konsentrasi pada indikator kinerja yang signifikan.
- Sistem pengukuran kinerja *reliable*: memproduksi data yang akurat dan konsisten sepanjang waktu.
- Sistem pengukuran kinerja bermanfaat (*useful*): menyediakan informasi yang bernilai baik untuk pembuat keputusan program maupun pengambilan kebijakan.
- Sistem pengukuran kinerja *accessible*: menjamin pengungkapan hasil yang tercapai secara sistematis dan periodik melalui usaha agensi.

Kinerja pemerintah daerah diukur dari hasil pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Secara umum setiap program dan kegiatan akan diukur dengan konsep 3E, yaitu: ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Dalam implementasinya mengukur ketiga hal ini memerlukan adanya keseragaman indikator sehingga dibutuhkan suatu standar pelayanan minimal yang dapat dijadikan sebagai acuannya. Berdasarkan Permendikbud No. 15 Tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota terdapat delapan indikator kinerja. Dengan indikator inilah pengukuran kinerja satuan pendidikan dapat dinilai. Indikator kinerja tersebut antara lain: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. Berikut tabel indikator standar pelayanan minimal pendidikan dasar:

Tabel 1  
Indikator Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Dimensi	Indikator
Isi	Kurikulum
	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Proses	Supervisi Pengawas
	Supervisi Kepala Sekolah
	Jam Kerja Guru

	Jam Kerja Sekolah
Kompetensi Lulusan	Hasil UN
	Melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kecukupan Guru
	Kualifikasi Guru
	Kualifikasi Guru Mata Pelajaran
	Kualifikasi Kepala Sekolah
	Kualifikasi Pengawas
Sarana dan Prasarana	Distribusi Sekolah
	Rombongan Belajar dan Ruang Kelas
	Ruang Guru
	Buku Teks
	Buku Pengayaan
	Alat Peraga IPA
Pengelolaan	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Pembiayaan	Subsidi
	Mandiri
Penilaian Pendidikan	Program Penilaian
	Laporan Evaluasi
	Laporan Ujian

Sumber: data diolah

### C. METODE PENELITIAN

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode pengambilan sampel bertujuan (*puspositive sampling*) yaitu sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Satuan pendidikan negeri sebagai penyedia pelayanan pendidikan yang dana operasionalnya masih banyak disubsidi oleh pemerintah dijadikan sebagai sampel penelitian. Digunakan teknik *scoring* untuk penilaian implementasi standar pelayanan minimal, kemudian dihitung persentase dari setiap *item* indikator yang sudah ditetapkan.

Tabel 2  
Skor Implementasi Standar Pelayanan Minimal

Angka	Skor	Kriteria
1	0	Tidak ada implementasi standar pelayanan minimal
2	1	Adanya implementasi standar pelayanan minimal tetapi belum sesuai
3	2	Adanya implementasi standar pelayanan minimal

Data yang telah terkumpul melalui perhitungan hasil kuesioner akan dianalisis dengan teknik deskriptif menggunakan persentase, berikut rumus yang digunakan:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

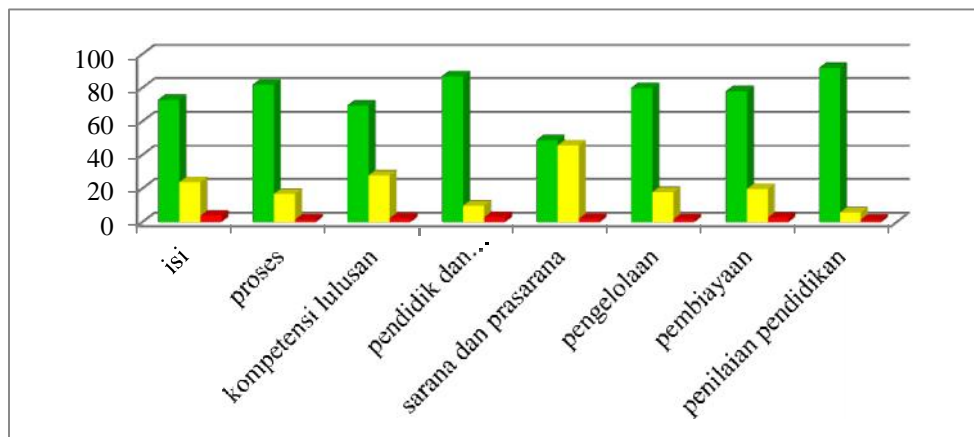
P= Angka Persentase

F=Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N=Number of Case (Jumlah frekuensi atau banyaknya individu) (Sudjana, 2000)

#### D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang dilaksanakan di Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, dengan mengambil sampel sebanyak 10 sekolah dasar negeri baik SDN maupun MIN melibatkan responden baik dari guru, orang tua siswa dan unsur masyarakat.



Gambar 1. Persentase Implementasi SPM Bidang Pendidikan

Keterangan:

■ Adanya implementasi standar pelayanan minimal

■ Adanya implementasi standar pelayanan minimal tetapi belum sesuai

■ Tidak ada implementasi standar pelayanan minimal

Dari gambar 1 diketahui bahwa responden menilai standar pelayanan minimal telah diimplementasikan oleh SDN/MIN di kecamatan Tanjung Seneng kota Bandar Lampung. Grafik indikator isi menunjukkan 73% responden menilai adanya implementasi terhadap indikator isi, yang sesuai, 23% responden menilai adanya implementasi terhadap indikator isi, tetapi belum sesuai, dan 4% responden menilai tidak ada implementasi terhadap indikator isi. Grafik proses menunjukkan 81% responden menilai adanya implementasi terhadap indikator proses yang telah sesuai, 17%



responden menilai adanya implementasi terhadap indikator proses, tetapi belum sesuai, 2% responden menilai tidak ada implementasi terhadap indikator proses. Grafik kompetensi lulusan menunjukkan 69,5% responden menilai adanya implementasi terhadap indikator kompetensi lulusan dan sesuai, 28% responden menilai adanya implementasi terhadap indikator kompetensi lulusan, tetapi belum sesuai, 2,5% responden menilai tidak ada implementasi terhadap indikator kompetensi lulusan. Grafik pendidik dan tenaga kependidikan menunjukkan 87% responden menilai adanya implementasi terhadap indikator pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah sesuai, 10% responden menilai adanya implementasi terhadap indikator pendidik dan tenaga kependidikan, tetapi belum sesuai, 3% responden menilai tidak ada implementasi terhadap indikator pendidik dan tenaga kependidikan. Grafik sarana dan prasarana menunjukkan 55% menilai adanya implementasi terhadap indikator sarana dan prasarana yang sudah sesuai, 42% menilai adanya implementasi terhadap indikator sarana dan prasarana, tetapi belum sesuai, 3% menilai tidak ada implementasi terhadap indikator sarana dan prasarana. Grafik pengelolaan menunjukkan 80% menilai adanya implementasi terhadap indikator pengelolaan dan sudah sesuai, 18% menilai adanya implementasi terhadap indikator pengelolaan, tetapi belum sesuai, 2% menilai tidak ada implementasi terhadap indikator pengelolaan. Grafik pembiayaan menunjukkan 78% menilai adanya implementasi terhadap indikator pembiayaan yang sudah sesuai, 19% menilai adanya implementasi terhadap indikator pembiayaan, tetapi belum sesuai, 3% menilai tidak ada implementasi terhadap indikator pembiayaan. Grafik penilaian pendidikan menunjukkan 92% menilai adanya implementasi terhadap indikator penilaian pendidikan dan sudah sesuai, 6% menilai adanya implementasi terhadap indikator penilaian pendidikan, tetapi belum sesuai, sisanya 2% menilai tidak ada implementasi terhadap indikator penilaian pendidikan. Dari penilaian terhadap implementasi standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar tersebut diketahui bahwa indikator dengan persentase tertinggi hingga persentase terendah adalah indikator penilaian, indikator pendidik dan tenaga kependidikan, indikator proses, indikator pengelolaan, indikator pembiayaan, indikator kompetensi lulusan, indikator sarana dan prasarana.

Dari hasil persentase perhitungan statistik deskriptif tersebut, akan dicari nilai interval dari hasil rata-rata yang diperoleh agar memberikan interpretasi atas nilai rata-rata yang diperoleh. Berpedoman pada perhitungan statistik deskriptif sebagai berikut (Sudjana, 2000):

Interval	Kategori
81-100%	Sangat Baik
61-80%	Baik
41-60%	Cukup
21-40%	Kurang
0-20%	Buruk

Penentuan persentase digunakan perhitungan sederhana dengan langkah sebagai berikut:

- Menentukan skor total yang diharapkan (TH) dengan cara menjumlah pertanyaan dengan skor tertinggi
- Menentukan skor total dari hasil penelitian (NS)
- Menentukan kategori persentase dengan rumus  $(NS:TH) \times 100\%$

Tabel 3  
Rata-Rata Implementasi Standar Pelayanan Minimal

Indikator	Persentase
Isi	73%
Proses	81%
Kompetensi dan lulusan	69,5%
Pendidik dan tenaga kependidikan	87%
Sarana dan prasarana	55%
Pengelolaan	80%
Pembiayaan	78%
Penilaian pendidikan	92%
Rata-rata	76,93%

Hasil perhitungan tabel rata-rata implementasi standar pelayanan minimal yang dihitung menunjukkan interval 76, 93% , masuk dalam kategori baik.

### E. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis statistik deskriptif implementasi standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh SDN/MIN di kecamatan Tanjung Seneng kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa secara umum indikator standar pelayanan minimal pendidikan dasar telah dilaksanakan. Indikator dengan penilaian tertinggi adalah indikator penilaian pendidikan dan penilaian terendah adalah indikator sarana dan prasarana. Implementasi standar pelayanan minimal secara keseluruhan memperoleh kategori baik dengan persentase 76,93%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN/MI di kecamatan Tanjung Seneng telah melakukan implementasi standar pelayanan minimal dalam kategori baik, tetapi terdapat beberapa indikator yang harus menjadi catatan bagi para *shareholder* bidang pendidikan, yakni indikator sarana dan prasarana, dan indikator kompetensi lulusan. Penilaian kedua indikator ini menempati posisi kedua terbawah dengan nilai masing-masing 55% dan 69,5%. Kedua indikator ini diharapkan mendapat perlakuan khusus seperti adanya program yang mampu menunjang peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, seperti program sejuta buku atau hibah pengadaan alat peraga IPA dari pemerintah pusat dan daerah sedangkan untuk peningkatan kompetensi lulusan, seperti penambahan jam belajar khusus bagi siswa yang akan menempuh ujian akhir diluar jam belajar yang sudah disepakati guru, siswa dan orang tua. Penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan dalam wilayah daerah/kota dan dalam rentang waktu periode pengamatan yang berkelanjutan.

### REFERENSI

- Afonso, Antonio dan Fernandes, Sonia. 2008. *Assessing and Explaining the Relative Efficiency of Local Government*. Journal of Socio Economics, Volume 37 Issue 5.
- Brignal, Stan dan Modell, Sven. 2000. *An institutional perspective on performance measurement and management in the „new public sector“*. Management Accounting Research, Volume 11 Issue 3.
- Cavaluzzo, Ken S, dan Ittner, Christopher D. 2004. *Implementing Performance Measurement*

- Innovations: Evidence from Government. Accounting, Organization and Society* Volume 29 Issue 3-4.
- Gudono, 2009. *Teori Organisasi*. Edisi 1. Penerbit Pencil Press
- Hackler, Darrene dan Gregory D. Saxton. 2007. *The Strategic Use of Information Technology by Nonprofit Organizations: Increasing Capacity and Untapped Potential*. *Public Administration Review*, Vol. 67 No.3
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta,BPFE
- Kreklow, Steven R., 2005. *Using Performance Measures to Improve Performance*, *Government Finance Review*, 21, 6
- Kuncoro,Mudrajat. 2004, *Otonomi dan pembangunan keuangan daerah*, Jakarta, Penerbit Erlangga 8-13.
- Local Governance Support Program (LGSP). 2008. *Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik dengan Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan (STPP)*. [www.lgsp.or.id](http://www.lgsp.or.id)
- Mardiasmo.2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Melkers, Julia dan Willoughby, Katherine, 2005. *Models of Performance-Measurement Use in Local Government: Understanding Budgeting, Communication, and Lasting Effects*. *Public Administration Review*.
- Permendikbud No. 15 Tahun 2013. *Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan*.
- Poister, Theodore H. 2003. *Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations*. 1st edition. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Republik Indonesia. 2005, *Peraturan Pemerintah Reublik Indonesia No. 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal*.
- Robinson, Pat. 2003. *Government Accountability and Performance Measurement*. *Critical Perspectives on Accounting*, Volume 14 Issue 1-2.
- Sarwono, Jonathan dan Ely Suhayati.2010. *Riset Akuntansi*. Graha Ilmu. Jakarta.
- S., Yogi dan M. Ikhsan. 2006. *Standar Pelayanan Publik di Daerah*. *Handbook Manajemen Pemerintah Daerah*. Penerbit PKKOD-LAN.
- Sekaran, Uma.2003. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sudjana.2000. *Pengantar Statistik*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Vries, Willem de. 2001. *Performance, Quality, Management. How Statistical Offices Try to Do*

*Better.* Paper for Kuala Lumpur Seminar.

Wang, Xiaohu. 2000. *Performance Measurement in Budgeting: A Study of County Government.* Public Budgeting and Finance, Fall 2000.